

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AUDIT KINERJA , DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Rizky Bayu Ananda¹, Tapi Rumondang Sari Siregar²
rzkybayu1@gmail.com¹, tapirumondang@unimed.ac.id²

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan rendahnya akuntabilitas keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan, yang ditandai oleh maraknya kasus korupsi, penyelewengan dana, dan lemahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didorong oleh kurangnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), audit kinerja yang efektif, serta transparansi yang memadai, sehingga mengakibatkan pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel dan rentan terhadap penyimpangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penerapan SAKD, audit kinerja, dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Medan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 64 responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sampling jenuh. Penelitian ini diuji menggunakan program IBM SPSS v.31 untuk menguji analisis data deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan dengan koefisien determinasi 61,9%. Secara parsial, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai koefisien 0,420 dan signifikansi 0,002, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan akurasi pelaporan dan pengendalian keuangan. Audit kinerja juga berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai koefisien 0,350 dan signifikansi 0,018, yang mengindikasikan bahwa audit yang efektif mampu mengidentifikasi ketidakefisienan dan memperkuat pengawasan. Namun, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan koefisien 0,049 dan signifikansi 0,597, yang menunjukkan bahwa transparansi saja belum cukup untuk meningkatkan akuntabilitas tanpa dukungan mekanisme pengawasan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan audit kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di OPD Kota Medan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Audit Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan.

Abstract

The problem in this study is related to the low level of Financial Accountability in the Regional Apparatus Organizations (OPD) of the Medan City Government, which is characterized by rampant cases of corruption, misappropriation of funds, and weak transparency in regional financial management. This is driven by the lack of implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD), effective Performance Audits, and adequate Transparency, resulting in unaccountable budget management and susceptibility to irregularities. The purpose of this study is to analyze the effect of the implementation of SAKD, Performance Audits, and Transparency on Financial Accountability, with the hope of providing recommendations for improving better regional financial governance. The population in this study was all finance

employees in Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Medan City Government. The sample size was 64 respondents. The sampling method used was saturated sampling. This study was tested using IBM SPSS v.31 to test descriptive data analysis, classical assumptions, multiple regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing. The results of this study indicate that simultaneously, the regional financial accounting system, performance audit, and transparency have a significant effect on financial accountability in the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Medan City Government with a coefficient of determination of 61.9%. Partially, the regional financial accounting system has a significant effect on financial accountability with a coefficient value of 0.420 and a significance of 0.002, indicating that the implementation of a good regional financial accounting system can improve the accuracy of financial reporting and control. Performance audits also have a significant positive effect on financial accountability with a coefficient value of 0.350 and a significance of 0.018, indicating that effective audits are able to identify inefficiencies and strengthen oversight. However, transparency does not have a significant effect on financial accountability with a coefficient of 0.049 and a significance of 0.597, indicating that transparency alone is not enough to improve accountability without the support of other oversight mechanisms. This study recommends improving the implementation of the regional financial accounting system and performance audits to improve financial accountability in the OPD of Medan City.

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Performance Audit, Transparency, Financial Accountability.*

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan akuntansi pemerintahan semakin pesat khususnya di Indonesia, terutama mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akan penerapan akuntabilitas pada lembaga – lembaga sektor publik, baik di pusat maupun daerah. Sebab, banyak departemen dan lembaga pemerintah yang memerlukan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Akuntabilitas dapat digambarkan sebagai perlunya suatu organisasi untuk mengambil tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada awalnya. Khususnya di bidang akuntabilitas keuangan, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk menerapkan akuntabilitas dan mendorong manajer sektor publik memberikan informasi dalam laporan keuangannya. Saat ini, akuntabilitas keuangan pemerintah menjadi perhatian masyarakat di Indonesia karena maraknya tindakan korupsi. Tindakan kecurangan seperti korupsi dan penyelewengan dana dapat ditekan melalui penyusunan laporan yang akuntabel serta kemajuan dalam Akuntansi Sektor Publik. Oleh karena itu, pemertintah harus menjalankan tanggung jawab secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan anggaran, guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah perkara korupsi tertinggi se Indonesia, dengan 153 terdaftar perkara korupsi per tahun 2024. Namun anehnya persoalan korupsi tidak juga dipandang sebagai faktor masalah yang menyebabkan angka kemiskinan dan lebih meyakini bahwasannya penyebab kemiskinan karena inflasi yang tinggi, sementara telah terbukti bahwa korupsi diakibatkan oleh tingkat akuntabilitas yang sangat lemah. Setelah diperiksa pelaku korupsi yang terlibat melainkan diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan pejabat swasta dalam praktik suap menuup, penggelapan dana proyek, penyalahgunaan anggaran, hingga projek fiktif yang merugikan keuangan negara. Dari 153 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, terbanyak diajukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, yang artinya kota Medan menjadi daerah yang paling mendominasi permasalahan korupsi bila dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara. Potensi kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara hingga desember 2024 meningkat drastis mencapai

angka sebesar Rp 1 triliun, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp 152 miliar pada tahun 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan, bersama empat orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada kamis (26/6/2025). Selain Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, empat tersangka lainnya adalah Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto selaku PPK Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT. Dalihan Natolu Group (DNG), dan M. Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT. RN. Lima tersangka kasus korupsi proyek jalan tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 28 juni 2025 hingga 17 juli 2025. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya transparansi, audit kinerja serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dana oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah juga memiliki peran penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Kegagalan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) seringkali menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana di pemerintah daerah, sehingga penerapan SAKD ini sangat penting diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan baik untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Sistem yang tidak terdigitalisasi atau belum terintegrasi juga mempersulit proses audit dan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Objek penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 64 orang.

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Audit Kinerja, dan Transparansi, sedangkan variabel dependen adalah Akuntabilitas Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian ini memperoleh bukti empiris bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung yang dimiliki oleh sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sebesar 3,214 dengan nilai signifikasinya 0,002. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,000 sehingga thitung > ttabel ($3,214 > 2,000$) dan nilai signifikasinya $0,002 < 0,05$. Serta nilai koefisien regresinya 0,420 yang menunjukkan

arah positif. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H1 dapat diterima. Hasil ini menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan, keandalan, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Artinya, temuan ini mencerminkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor determinan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan,

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari, (2021) membuktikan bahwa daerah yang menerapkan sistem akuntansi yang baik menunjukkan peningkatan signifikan dalam akuntabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Dady & Abdul Khalik, (2023) juga menunjukkan bahwa adanya sistem pelaporan yang jelas dan terstandarisasi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan memperkuat akuntabilitas.

Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya hubungan antara principal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai principal atas penggunaan dana publik. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan transparansi. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi yang efektif tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pengelola keuangan, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil pengujian ini memperoleh bukti empiris bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung yang dimiliki oleh audit kinerja yaitu sebesar 2,423 dengan nilai signifikasinya 0,018. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,000 sehingga thitung > ttabel ($2,423 > 2,000$) dan nilai signifikasinya $0,018 < 0,05$. Serta nilai koefisien regresinya 0,350 yang menunjukkan arah positif. Sehingga dengan hasil tersebut dapat dikatakan H2 dapat diterima.

Audit kinerja merupakan audit yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai bentuk bukti untuk menilai kinerja dari entitas yang di audit dalam hal efisiensi dan efektivitas, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang di audit dalam hal efisiensi and efektivitas. Keberadaan audit kinerja yang kuat dapat meningkatkan pengawasan yang lebih efektif, serta pendekatan yang berfokus pada efisiensi dan ekonomi dapat membantu optimalisasi alokasi sumber daya yang tersedia. Peningkatan akuntabilitas keuangan melalui audit kinerja menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan OPD Pemerintah Kota Medan, memberikan manfaat positif bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebimobowi et al., (2021) bahwa audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas keuangan sejalan dengan teori keagenan karena audit mewajibkan agen untuk memberikan laporan yang transparan dan akurat tentang penggunaan dana. Audit ini meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan mengidentifikasi ketidakefisienan, memicu perbaikan dan meminimalkan

penyalahgunaan dana. Hal ini sejalan dengan teori keagenan karena audit membantu principal memantau kinerja agen, mengurangi biaya keagenan, dan memastikan keputusan keuangan sejalan dengan kepentingan bersama, sehingga memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thitung yang dimiliki oleh transparansi yaitu sebesar 0,531 dengan nilai signifikasinya 0,597. Sedangkan nilai ttabel sebesar 2,000 sehingga thitung > ttabel ($0,531 < 2,000$) dan nilai signifikasinya $0,597 > 0,05$. Serta nilai koefisien regresinya 0,049 yang menunjukkan arah positif. Sehingga dengan hasil tersebut dapat diakatakan H3 ditolak. Artinya, transparansi belum memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Hal ini dikarenakan transparansi dalam dirinya sendiri, tanpa didukung oleh sistem pengawasan yang kuat atau tanpa keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, tidak cukup untuk membuat akuntabilitas keuangan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, transparansi harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan untuk meningkatkan hal tersebut diperlukan kombinasi dari berbagai faktor yang saling mendukung, sehingga transparansi tidak cukup menjadi salah satu faktor untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang lebih baik. OPD tersebut mungkin telah menyediakan laporan keuangan secara terbuka yang dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), memberikan informasi lengkap tentang penggunaan anggaran, dan memiliki aturan yang jelas terkait transparansi. Namun dalam prakteknya, manajemen keuangan dan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mengadopsi informasi tersebut untuk memperbaiki proses akuntabilitas keuangan. Mungkin masih terdapat hambatan dalam menghubungkan transparansi dengan langkah – langkah konkret yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, seperti pengawasan yang ketat atau peningkatan tanggung jawab pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana & Zulkifli, (2024) bahwasannya transparansi tidak berpengaruh karena pada dasarnya untuk penerapan akuntabilitas yang baik tidak cukup dengan hanya transparansi saja, butuh adanya seperti pengawasan yang kuat agar akuntabilitas keuangan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan teori agensi, agen menekankan adanya ketidakseimbangan informasi dimana agen memiliki lebih banyak pengetahuan tentang operasi internal dibandingkan principal, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Transparansi dianggap penting untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut, karena dengan adanya transparansi, principal dapat lebih mudah memantau kinerja agen, mengakses informasi keuangan yang akurat, dan menegakkan akuntabilitas melalui pengawasan yang efektif. Pada penelitian ini, transparansi tidak sejalan dengan teori agensi karena teori tersebut memprediksi bahwa peningkatan transparansi akan memperbaiki akuntabilitas dengan meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan principal terhadap agen, sedangkan temuan ini menunjukkan bahwa transparansi mungkin tidak cukup kuat sebagai mekanisme kontrol dalam konteks pemerintah daerah, yang disebabkan regulasi yang lemah atau hambatan implementasi yang lebih dominan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Audit Kinerja, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hipotesis yang muncul yaitu hipotesis empat dilakukan pengujian simultan (Uji F), maka terdapat hasil akhir yaitu $32,463 > 2,755$ diikuti dengan nilai signifikan sejumlah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H4 diterima sehingga disimpulkan secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan. Melalui integrasi data secara real – time, yang mengurangi kesalahan manusia, meminimalkan manipulasi, dan meningkatkan akurasi pelaporan keuangan. Hal ini memungkinkan OPD untuk mengelola anggaran secara terpusat, sehingga setiap transaksi dapat diawasi dengan ketat, mengurangi resiko fraud, dan memastikan penggunaan dana publik sesuai prioritas pembangunan daerah. Tujuannya untuk memperkuat akuntabilitas keuangan di OPD dengan memastikan transparansi penggunaan anggaran, pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan seperti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan. Pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara efisien dan terstruktur dapat menilai efisiensi dan efektivitas entitas yang diperiksa, dengan tujuan membantu meningkatkan kinerja entitas yang bersangkutan. Hal tersebut mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien serta mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan dana, sehingga audit kinerja menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Transparansi memiliki dampak dalam peningkatan akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Medan. Meskipun terlihat sebagai faktor kecil, transparansi menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas dengan menyediakan akses mudah dan keterbukaan informasi serta proses yang jelas. Hal ini membuat manajemen yang lebih efisien dan kontrol yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan OPD, dengan kerangka regulasi yang menjamin transparansi sebagai dasar. Sehingga, OPD Pemerintah Kota Medan dapat membangun reputasi integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, memberikan manfaat positif bagi pihak – pihak terkait dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya pengaruh simultan dari ketiga faktor ini, penting bagi OPD Pemerintah Kota Medan menerapkan dan meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi. Sistem akuntansi keuangan daerah memastikan pengelolaan keuangan pada pengelolaan keuangan yang bebas korupsi dengan cara memfasilitasi pelacakan transaksi lintas departemen secara otomatis. Audit kinerja membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi standar operasional dan regulasi yang relevan. Transparansi memperkuat implementasi berdasarkan standar yang berlaku dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang tepat dan akurat. Dengan begitu akan tercapai akuntabilitas keuangan yang baik di organisasi perangkat daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 26, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintahan kota Medan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Medan dengan nilai signifikan 0,002. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

Kedua, audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Medan dengan nilai signifikansi 0,018. Temuan ini mengindikasikan bahwa audit kinerja berperan penting dalam mengidentifikasi ketidakefisienan kinerja suatu entitas, memicu perbaikan, dan meminimalkan penyalahgunaan dana, sehingga memperkuat kepercayaan dan tanggungjawab.

Ketiga, transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kota Medan dengan nilai signifikansi 0,597. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi tidak menjadi penentu dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Keempat, sistem akuntansi keuangan daerah, audit kinerja, dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintahan kota Medan. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi kemampuan yang dijelaskan variabel X terhadap variabel Y dalam model ini adalah sebesar 61,9%. Sedangkan sisanya 38,1% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Saran

Hasil yang diperoleh melalui nilai R Square sebesar 61,9%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X terhadap variabel Y masih belum tinggi, yaitu masih dalam kategori moderat. Serta dalam penelitian ini, variabel transparansi (X3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan (Y). Sehingga atas dasar tersebut, ada beberapa saran dalam penelitian ini :

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas penggunaan variabel – variabel lainnya seperti laporan keuangan, komitmen kepala daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintah.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat melakukan modifikasi ataupun penggunaan kuesioner dari sumber lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ame Venessa Veronika Br Ginting.(2021), Pengaruh Value For Money, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karo Dimoderasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Skripsi Universitas Negeri Medan.
- Ame Venessa Veronika Br Ginting.(2021), Pengaruh Value For Money, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karo Dimoderasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Skripsi Universitas Negeri Medan.
- Arens, Alvin A. (2017). Auditing and Assurance Services. Boston. Person Education
- Arens, Alvin A. (2017). Auditing and Assurance Services. Boston. Person Education
- Ayuning, P., & Pramesti. (2020). Pengaruh komitmen kepala daerah, penerapan good governance, audit kinerja, dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas

- keuangan pemerintahan daerah kabupaten Tegal. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ayuning, P., & Pramesti. (2020). Pengaruh komitmen kepala daerah, penerapan good governance, audit kinerja, dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah kabupaten Tegal. Universitas Pancasakti Tegal.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Banten. Erlangga.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Banten. Erlangga.
- Budiastuti D & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reliabilitas Penelitian. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Budiastuti D & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reliabilitas Penelitian. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Dady, J., & Abdul Khalik. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Nobel Management Review, 4(3), 476–488.
- Dady, J., & Abdul Khalik. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan. Nobel Management Review, 4(3), 476–488.
- Ebimobowei, J.U., O., & A.J., A. (2021). Public Sector Audit, Transparency and Good Governance on Financial Accountability of Public Sector Entities in Rivers State, Nigeria. African Journal of Accounting and Financial Research, 4(3), 15–38.
- Ebimobowei, J.U., O., & A.J., A. (2021). Public Sector Audit, Transparency and Good Governance on Financial Accountability of Public Sector Entities in Rivers State, Nigeria. African Journal of Accounting and Financial Research, 4(3), 15–38.
- Emmanson, M., & Ajayi, F. (2021). Effects of Public Sector Entities Reform on Transparency and Accountability in Nigeria between Year 2015- 2020. SSRN Electronic Journal, Acc909. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3849174>
- Emmanson, M., & Ajayi, F. (2021). Effects of Public Sector Entities Reform on Transparency and Accountability in Nigeria between Year 2015- 2020. SSRN Electronic Journal, Acc909. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3849174>
- Eton, M et all. (2019). Internal control systems and financial accountability in Uganda : A case of selected districts in western. International Journal of Commerce and Management Research. 4(4), 106–111.
- Eton, M et all. (2019). Internal control systems and financial accountability in Uganda : A case of selected districts in western. International Journal of Commerce and Management Research. 4(4), 106–111.
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976) Theory of the Firm: Managerial behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 305 - 360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976) Theory of the Firm: Managerial behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 305 - 360.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science. 3(02), 223–233.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science. 3(02), 223–233.
- Juliyantri, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS), 3(1), 1–17.
- Juliyantri, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

- Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS), 3(1), 1–17.
- Lewerissa, N., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Good Governance, Audit Kinerja, Dan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*7(10),1–17.
- Lewerissa, N., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Good Governance, Audit Kinerja, Dan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Opd Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*7(10),1–17.
- Mahmudi, S. E. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mahmudi, S. E. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mahsun, M., et al. (2011). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Mahsun, M., et al. (2011). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta. Andi.
- Mulana, D. (2023). Pengaruh Audit Kinerja, Good Governance, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi Universitas Negeri Medan
- Mulana, D. (2023). Pengaruh Audit Kinerja, Good Governance, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi Universitas Negeri Medan
- Nasution, R. H., Syafina, L.(2024). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kelurahan (Studi Kasus Kantor Lurah Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*,2(4), 65-78.
- Ogundajo, G. O., Oyedokun, G. E., & Ajibade, A. T. (2019). Accountability and Transparency in the Nigerian Public Service: a Study of Selected Local Government in Ogun State in Nigeria. *Islamic University Multidisciplinary Journal IUMI*, 6(3), 2409–0263.
- Pulungan, & Nurhamidah. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 2(1), 48–56.
- Putri, T. K. M., Suhaidar, S., & Rudianto, N. A. R. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1511–1524.
- Putri, T. K. M., Suhaidar, S., & Rudianto, N. A. R. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1511–1524.
- Salihi, S., Ignasius Ridwan Hutaarak, & Hasnarika. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 769–778.
- Salihi, S., Ignasius Ridwan Hutaarak, & Hasnarika. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 769–778.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457.
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Septiawati, Hizazi, A., & Mansur, F. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Aparat Desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten

- Merangin). Jambi Accounting Review (JAR), 2, 14–29.
- Septiawati, Hizazi, A., & Mansur, F. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Aparat Desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin). Jambi Accounting Review (JAR), 2, 14–29.
- Sjahruddin Rasul. (2003). Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta. Perum Percetakan Negara.
- Sjahruddin Rasul. (2003). Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta. Perum Percetakan Negara.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.
- Sulastri, Y. (2025). KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan. <https://nusantarainfo.com/kpk-tetapkan-kadis-pupr-sumut-sebagai-tersangka-kasus-korupsi-proyek-jalan/>
- Wulandari, N. D. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor kecamatan Kota Medan. Juripol, 4(1), 128–137.
- Yulisfan et al. (2025). Peran Audit Kinerja Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Sektor Publik di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. 5(3), 206-214.
- Zeyn, E. (2018). The Effect of Internal Audit Quality on Financial Accountability Quality at Local Government. Journal of Accounting, Business and Finance Research, 4(2), 74.
- Zubahir Azhar ; Dyah Setyaningrum; Cris Kustandi; Lita Dharmayuni. (2024). Revitalizing accountability: exploring the impact of performance audits in Indonesia's public sector. Journal of Economics and Public Policy.